

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia yang melandasi terciptanya interaksi sosial antara komunikator dan komunikan yang memungkinkan terjalinnya hubungan. Salah satu bentuk komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari adalah komunikasi interpersonal. Menurut Suranto (2011), komunikasi interpersonal yakni bentuk komunikasi tatap muka yang memungkinkan para partisipan saling memahami reaksi lawan bicara secara langsung. Sejalan dengan pandangan tersebut, DeVito (2016) menyatakan bahwa komunikasi interpersonal memiliki peran penting dalam membentuk hubungan yang efektif antara dua individu melalui pertukaran pesan, baik secara verbal maupun nonverbal. Dalam praktiknya, Cangara (2014) berpendapat bahwa komunikasi interpersonal masuk ke dalam sifat diadik, yaitu interaksi langsung antara dua orang maupun interaksi dalam kelompok kecil yang melibatkan komunikasi tatap muka antara tiga orang atau lebih di mana setiap anggota saling memberikan respons.

Dalam dunia pendidikan, komunikasi menjadi komponen utama yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran, terutama ketika guru harus berinteraksi dengan siswa yang memiliki latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Komunikasi yang efektif tidak hanya sebatas menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut dipahami sesuai dengan tujuan (Mulyana, 2018). Oleh karena itu, kualitas komunikasi

interpersonal antara guru dan siswa menjadi faktor kunci dalam menciptakan interaksi pembelajaran yang efektif. Mengingat pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap anak tanpa terkecuali, pemenuhan hak ini juga berlaku penuh bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Komitmen untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan non-diskriminatif bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, telah menjadi perhatian global dan nasional. Di tingkat internasional, komitmen ini diselaraskan melalui ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), Konvensi Hak Anak (KHA), serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Di tingkat nasional, penguatan sistem pendidikan inklusi sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan pemerintah menyediakan akses layanan pendidikan yang memadai. Hal ini juga diperjelas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 12 Ayat 2b yang menjamin jalur afirmasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah reguler. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa ABK, baik yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, sosial, maupun potensi kecerdasan istimewa, berhak mendapatkan layanan pendidikan di sekolah reguler bersama siswa reguler lainnya dalam satu kelas melalui penyesuaian pembelajaran yang adaptif.

Namun, di balik kuatnya komitmen regulasi tersebut, realitas di lapangan masih menunjukkan kesenjangan (*gap*) yang cukup besar antara harapan dan kenyataan. Berdasarkan data hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, lebih dari 75 persen anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai (Kemenko PMK, 2023, dalam (Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2024). Data tersebut diperkuat oleh fakta bahwa pada kelompok usia 13–15 tahun yang secara kronologis berada pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 28,93 persen anak penyandang disabilitas tercatat belum atau tidak pernah bersekolah sama sekali. Angka ini berbanding terbalik dengan anak tanpa disabilitas pada kelompok usia yang sama, yang persentase tidak bersekolahnya hanya sebesar 1,04 persen. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan bagi ABK belum sepenuhnya setara.

Sebagai salah satu langkah nyata untuk menjawab tantangan akses tersebut, pemerintah menyelenggarakan sekolah inklusi dengan menempatkan Guru Pendamping Khusus (GPK) sebagai aktor strategis. GPK tidak hanya bertugas memfasilitasi kebutuhan akademik, melainkan juga memegang peran penting sebagai jembatan komunikasi utama antara siswa berkebutuhan khusus dengan lingkungan sekolahnya. Berbeda dengan guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mengajar dalam lingkungan homogen karena siswa telah dikelompokkan secara spesifik berdasarkan jenis kebutuhan (seperti tunanetra, tunarungu, atau tunagrahita), GPK di sekolah inklusi menghadapi kompleksitas tantangan yang jauh

lebih tinggi. Di sekolah inklusi, GPK dihadapkan pada situasi multi kebutuhan dimana berbagai karakteristik disabilitas berada dalam satu lingkungan belajar yang sama. Kondisi ini menuntut kemampuan adaptasi, fleksibilitas, serta keterampilan komunikasi interpersonal yang lebih beragam dari seorang GPK.

Keterampilan komunikasi interpersonal GPK memiliki urgensi yang semakin nyata ketika ditinjau dari data Long Form Sensus Penduduk 2020, yang menunjukkan bahwa jenis disabilitas yang paling banyak dialami oleh anak usia sekolah adalah gangguan komunikasi atau bicara, gangguan berpikir atau belajar, serta gangguan konsentrasi (Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2024). Hambatan-hambatan bawaan ini secara langsung memengaruhi kemampuan ABK dalam menjalin interaksi dan memahami pesan, sehingga kemampuan komunikasi interpersonal yang adaptif, empatik, dan responsif dari GPK menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan diri, memberikan rasa aman, serta mendorong keterlibatan aktif ABK dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penegasan UNESCO (2020) bahwa menciptakan iklim sekolah yang inklusif dan memberikan dukungan emosional dari guru merupakan aspek penting dalam keberhasilan pendidikan inklusi, karena hal tersebut berperan penting dalam membangun rasa saling memiliki (*sense of belonging*) dan mendukung keterlibatan siswa. Sebaliknya, adanya penolakan atau kurangnya penerimaan dari guru dan lingkungan sekolah tidak hanya berdampak buruk pada capaian akademik dan ketidaksesuaian strategi pembelajaran, tetapi juga berpotensi memicu kerenggangan hubungan serta memunculkan perasaan terisolasi pada diri siswa berkebutuhan khusus. Fenomena inilah yang

melatarbelakangi pentingnya evaluasi berkala terhadap sikap guru dan pola interaksi di sekolah guna meminimalkan risiko keterasingan sosial dan memastikan semua siswa merasa diterima di tengah lingkungan inklusi.

Dalam konteks daerah, fenomena implementasi pendidikan inklusi di Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai salah satu daerah yang aktif menyelenggarakan pendidikan inklusi sejak tahun 2009, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan terus berupaya memperluas akses bagi siswa berkebutuhan khusus. Upaya ini terlihat dari penambahan jumlah sekolah inklusi secara bertahap, salah satunya pada tahun 2017 terdapat penambahan lima satuan pendidikan inklusif pada jenjang SMP, yang menggenapkan totalnya menjadi 25 satuan pendidikan serta didukung oleh keberadaan Pusat Layanan Disabilitas (PLD). Dinamika ini turut mendorong perubahan sikap masyarakat dan orang tua dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi anak disabilitas di sekolah reguler.

Meskipun demikian, muncul tantangan baru ketika layanan pendidikan inklusi hanya terpusat pada sebagian kecil sekolah, yang mengakibatkan ketidakseimbangan rasio jumlah siswa berkebutuhan khusus serta keterbatasan jumlah GPK yang tersedia. Menanggapi permasalahan tersebut, mulai tahun ajaran 2024/2025, Dinas Pendidikan Kota Surabaya menetapkan kebijakan zonasi inklusi yang mewajibkan seluruh satuan pendidikan negeri, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, untuk menerima siswa berkebutuhan khusus agar mereka dapat bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Surabaya (2025), tercatat 60 dari 402 SMP/MTs di Surabaya

berstatus sekolah inklusi dengan melayani 1.092 siswa berkebutuhan khusus yang tersebar di berbagai wilayah kota.

Namun, lonjakan kuantitas sekolah inklusi dan siswa berkebutuhan khusus di Kota Surabaya ini pada realitasnya memicu permasalahan krusial baru, yaitu terjadinya krisis kelangkaan tenaga GPK secara masif. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kelangkaan ini diperparah oleh tingginya angka pensiun guru yang mencapai kurang lebih 1.700 tenaga pengajar dalam beberapa tahun terakhir (Jatimtoday.co.id, 2025). Guna mengatasi hambatan distribusi dan keterbatasan tenaga profesional tersebut, Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengambil langkah darurat (*emergency measure*) dengan memberikan pelatihan intensif mengenai tata cara penanganan siswa berkebutuhan khusus kepada guru umum yang sudah ada, khususnya guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru kelas (Mahanani, dalam Jatimtoday.co.id, 2025).

Meskipun mayoritas siswa berkebutuhan khusus di sekolah negeri se-Kota Surabaya berada pada kategori tingkatan ringan hingga sedang, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Putri Aisyah Mahanani, mengakui bahwa para guru saat di lapangan tetap menghadapi tantangan besar dan merasa kewalahan dalam memastikan penerapan metode pembelajaran serta pola pendekatan yang tepat (Jatimtoday.co.id, 2025). Hal ini terjadi karena guru umum yang mendapatkan pelatihan tersebut tidak dibekali dengan sertifikasi resmi sebagai GPK, melainkan hanya mendapatkan instruksi praktis penanganan sementara. Akibatnya, keterbatasan kompetensi khusus dan ketiadaan sertifikasi resmi ini memengaruhi kualitas pendampingan profesional yang ideal bagi siswa berkebutuhan khusus,

padahal kehadiran tenaga ahli yang terspesialisasi sangat penting untuk menjaga kondusivitas proses belajar mengajar di sekolah inklusi.

Kondisi nyata mengenai kelangkaan GPK serta adanya fenomena "guru umum lintas tugas" yang tidak tersertifikasi ini menjadi landasan yang kuat mengapa peningkatan kuantitas sekolah inklusi di Kota Surabaya belum diimbangi dengan kesiapan struktural dalam membangun komunikasi interpersonal yang efektif antara pendidik dengan siswa berkebutuhan khusus. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ursula et al. (2023) mengonfirmasi realitas tersebut, dimana guru di sekolah inklusi ditemukan masih menghadapi berbagai kendala dalam proses penyampaian instruksi yang sesuai dengan karakteristik siswa berkebutuhan khusus serta dalam menerapkan strategi komunikasi yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika komunikasi interpersonal antara siswa berkebutuhan khusus dan guru dalam pendidikan inklusi, khususnya di jenjang SMP, masih menjadi tantangan mendalam yang belum terselesaikan secara ideal.

Dalam praktiknya, pengelolaan kelas inklusi di Kota Surabaya umumnya menerapkan model *full inclusive*, yaitu menggabungkan siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler dalam satu ruang kelas yang sama selama proses pembelajaran. Sebagai penunjang, sekolah menyediakan fasilitas berupa ruang sumber (*resource room*) atau ruang pintar yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran tambahan, terapi, layanan konsultasi, serta dilengkapi alat bantu dan media pembelajaran yang tersedia. Salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan sistem inklusi komprehensif ini adalah SMP Negeri 31 Surabaya. Sekolah ini merupakan sekolah rintisan inklusi di Surabaya sejak tahun 2014 yang

memiliki komitmen kuat, yang dibuktikan melalui pelaksanaan Deklarasi Sekolah Ramah Anak pada Juni 2024 demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.



Gambar 1.1 Logo SMP Negeri 31 Surabaya

Selain sejarahnya sebagai pionir, SMP Negeri 31 Surabaya memiliki jumlah siswa berkebutuhan khusus yang relatif tinggi, yaitu sebanyak 40 siswa, yang menempatkannya pada peringkat keempat di antara SMP Negeri se-Kota Surabaya. Populasi yang besar ini dinilai sangat representatif untuk menggambarkan realitas praktik pendidikan inklusi serta pengalaman sekolah dalam mengelola keberagaman karakteristik peserta didik. Terlebih lagi, karakteristik siswa berkebutuhan khusus di sekolah ini sangat variatif, meliputi disabilitas *down syndrome*, tunagrahita, hingga *slow learner*, yang secara otomatis menuntut pola komunikasi interpersonal yang sangat adaptif dari guru pendamping yang bertugas dalam mengoptimalkan proses pembelajaran sehari-hari. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada fokus penelitian yang spesifik pada interaksi guru pendamping, mengingat tidak seluruh sekolah inklusi dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus tinggi menyediakan guru pendamping yang memadai, serta untuk memberikan perspektif baru yang berbeda dari objek-objek penelitian terdahulu.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 31 Surabaya. Peneliti menemukan sejumlah fenomena krusial dalam interaksi sehari-hari antara guru pendamping dan siswa berkebutuhan khusus di dalam ruang sumber, antara lain rendahnya respons siswa berkebutuhan khusus terhadap instruksi verbal, tingginya kebutuhan akan pengulangan pesan (*repetition*), serta adanya kesenjangan pemaknaan pesan (*mispersepsi*) antara guru pendamping dengan siswa berkebutuhan khusus. Hambatan interaksi ini serupa dengan temuan Ade Martha et al. (2022) yang menunjukkan bahwa guru sering kali menghadapi kesulitan komunikasi akibat keterbatasan bahasa verbal siswa (seperti pada kasus *down syndrome*), sehingga harus mengandalkan pengulangan pesan yang masif serta mengandalkan komunikasi nonverbal. Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan karakteristik siswa berkebutuhan khusus menuntut adanya komunikasi interpersonal yang adaptif dan efektif, khususnya dalam sekolah inklusi yang memiliki keragaman kebutuhan dalam satu lingkungan belajar. Di sekolah inklusi seperti SMP Negeri 31 Surabaya, hambatan tersebut menjadi jauh lebih kompleks karena keterbatasan latar belakang profesi guru pendamping darurat diposisikan untuk menghadapi keragaman jenis kebutuhan (multi-kebutuhan) dalam satu ruang pintar yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika komunikasi interpersonal antara guru pendamping dan siswa berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi merupakan fenomena yang kompleks dan penting untuk diteliti lebih lanjut. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan proses penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga menyangkut bagaimana pesan dipahami, direspons, serta

dimaknai oleh siswa berkebutuhan khusus yang memiliki karakteristik yang beragam. Kemudian dalam praktiknya, perbedaan kemampuan, kondisi, serta kebutuhan individu siswa berkebutuhan khusus berpotensi menimbulkan berbagai hambatan dalam proses komunikasi yang berlangsung di dalam ruang sumber.

Sejauh ini, penelitian terdahulu mengenai komunikasi interpersonal telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada ranah komunikasi antara orang tua dan anak, komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, maupun komunikasi guru dengan siswa dalam konteks pembelajaran secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik mengenai komunikasi interpersonal antara guru pendamping dan siswa berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), khususnya di Kota Surabaya, masih relatif terbatas. Selain itu, penggunaan pendekatan humanistik dalam menganalisis komunikasi interpersonal pada konteks ini juga belum banyak dikembangkan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah ilmiah (*research gap*) tersebut untuk menunjukkan perlunya penelitian lebih mendalam mengenai dinamika komunikasi interpersonal terbangun dan hambatan yang muncul dalam interaksi antara guru pendamping dengan siswa berkebutuhan khusus. Kondisi ini juga menjadikan dinamika pada komunikasi interpersonal antara guru pendamping dengan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi sebagai fenomena yang menarik untuk diteliti, mengingat adanya tuntutan kemampuan komunikasi yang adaptif, empatik, dan fleksibel.

Secara akademis, penelitian ini memiliki nilai penting karena dapat berkontribusi memperkaya penelitian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang

komunikasi interpersonal pada konteks pendidikan inklusi yang hingga kini masih relatif terbatas diteliti. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana komunikasi interpersonal antara siswa berkebutuhan khusus dengan guru pendamping terbentuk dalam situasi pembelajaran yang menuntut pendekatan komunikasi yang adaptif. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi guru pendamping dalam meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal, membantu pihak sekolah dalam mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran inklusif, serta menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah (khususnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya) dalam merumuskan kebijakan pelatihan serta pengajuan kuota formasi resmi Guru Pendamping Khusus ke pemerintah pusat di masa depan.

Berangkat dari urgensi nyata tersebut, peneliti memandang penting untuk melakukan penelitian mendalam mengenai “Komunikasi Interpersonal antara Siswa Berkebutuhan Khusus dengan Guru Pendamping di Sekolah Inklusi (Studi di SMP Negeri 31 Surabaya)” menjadi penting dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisis komunikasi interpersonal yang berlangsung dalam proses pembelajaran inklusif. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada penyusunan strategi komunikasi yang lebih efektif, mendorong peningkatan kualitas pembelajaran inklusif, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam ranah komunikasi pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi interpersonal

antara siswa berkebutuhan khusus dengan guru pendamping di sekolah inklusi (Studi di SMP Negeri 31 Surabaya)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi interpersonal antara siswa berkebutuhan khusus dengan guru pendamping di sekolah inklusi, khususnya di SMP Negeri 31 Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi interpersonal pada pendidikan inklusi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai komunikasi interpersonal antara siswa berkebutuhan khusus dan guru pendamping, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai penerapan teori komunikasi interpersonal dalam implementasi pendidikan inklusi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan pengetahuan peneliti dalam bidang ilmu komunikasi, baik secara umum maupun secara khusus terkait

komunikasi interpersonal antara siswa berkebutuhan khusus dengan guru pendamping. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi dasar referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal dalam lingkungan pendidikan inklusi.

b. Bagi Guru Pendamping

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi guru pendamping, khususnya di SMP Negeri 31 Surabaya, dalam meningkatkan komunikasi interpersonal dengan siswa berkebutuhan khusus. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas diharapkan dapat lebih optimal dan adaptif.

c. Bagi Sekolah (SMP Negeri 31 Surabaya) dan Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran inklusif, khususnya dalam aspek komunikasi antara guru pendamping dan siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan program peningkatan kompetensi komunikasi bagi guru pendamping serta mendukung pengembangan kebijakan pengelolaan pendidikan inklusif yang lebih efektif.